

PERTARUNGAN WACANA PEMERINTAH DAN PUBLIK TENTANG PANDEMI COVID-19

Nursatyo^{1*)}, Humaini²

^{1,2} Universitas Nasional, Universitas Nasional

*) Surel Korespondensi: nursatyo@civitas.unas.ac.id

Kronologi Naskah: diterima 12 Januari 2021; direvisi 10 Maret 2021; diputuskan 21 Maret 2021

Abstrak

Pandemi Covid-19 di seluruh dunia menimbulkan berbagai persoalan, terutama di bidang kesehatan dan ekonomi. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi dampak Covid-19. Salah satu upaya pemerintah adalah melakukan berbagai strategi komunikasi publik untuk mempengaruhi wacana dan perilaku masyarakat agar terhindar dari bahaya virus ini. Meski demikian, upaya pemerintah mengkonstruksi wacana publik harus berhadapan dengan wacana publik yang bersumber dari informasi yang tersebar di internet. Artikel ini berupaya untuk memahami konstruksi wacana pemerintah dan juga wacana publik tersebut melalui metode penelusuran data sekunder di internet. Kesimpulan yang dapat diambil adalah wacana yang dikonstruksi pemerintah dalam upaya menangani dampak pandemi Covid-19 adalah selalu ada jalan tengah antara kepentingan kesehatan dan kepentingan ekonomi. Masyarakat harus tetap produktif bekerja dengan tetap menjaga kesehatan. Sementara wacana publik lainnya yang turut berkembang adalah bahwa Covid-19 merupakan bentuk konspirasi global yang bertujuan untuk mengacaukan tata perekonomian dunia.

Kata Kunci: Konstruksi Wacana Pemerintah; Pandemi Covid-19.

Abstract

The Covid-19 pandemic around the world has caused various problems, especially in the health and economic sectors. Various efforts have been made by the government to overcome the impact of Covid-19. One of the government's efforts is to carry out various public communication strategies to influence public discourse and behavior in order to avoid the virus. However, the government's efforts to construct public discourse must deal with other discourses that are sourced from information spread on the internet. This article seeks to understand the construction of government discourse and other discourses by using secondary data from internet. The conclusion that can be drawn is that the discourse constructed by the government in an effort to deal with the impact of the Covid-19 pandemic is that there is always a middle way between health interests and economic interests. People must remain productive at work while maintaining health. Meanwhile, another public discourse that has also developed is that Covid-19 is a form of global conspiracy that aims to destabilize the world economy.

Keywords: Government Discourse Construction, Covid-19 Pandemic.

Pendahuluan

Informasi tentang wabah COVID-19 mulai muncul pertama kali pada 31 Desember 2019, pada saat Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization/ WHO*) Kantor Perwakilan di China mendapatkan informasi tentang adanya banyak pasien di rumah sakit di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, yang memiliki gejala seragam mirip pneumonia. Penelusuran penulis di google menemukan bahwa berita pertama tentang pneumonia misterius di Wuhan dipublikasi oleh situs berita online South China Morning Post www.scmp.com pada tanggal 31 Desember 2019 berjudul “Hong Kong takes emergency measures as mystery ‘pneumonia’ infects dozens in China’s Wuhan city”.¹ Sejak itu pemberitaan tentang fenomena virus yang mirip pneumonia di Wuhan semakin ramai diberitakan oleh media di seluruh dunia.

Sejak itu pula WHO melakukan penyelidikan tentang banyaknya korban yang berjatuh dengan kondisi yang sama. Berdasarkan timeline kronologis peristiwa di laman (website) WHO, disebutkan bahwa 6 hari kemudian, atau tanggal 5 Januari 2020 WHO mengeluarkan laporan Berita Wabah Penyakit (*Disease Outbreak News*) pertamanya melalui laman WHO yang ditujukan kepada komunitas ilmiah dan kesehatan masyarakat, serta media global. Laporan tersebut berisi informasi tentang jumlah kasus dan status klinisnya.²

Di Indonesia, berita tentang virus misterius di Wuhan, mulai diwartakan pertama kali oleh situs berita online www.kontan.co.id yang pada tanggal 3 Januari 2020, yang menuliskan beritanya bersumber dari South China Morning Post dengan judul “Viral wabah pneumonia

misterius yang menjangkiti China, begini ceritanya”.³ Waktu itu belum disebut virus COVID-19 melainkan virus pneumonia atau virus Corona Sars. Istilah COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*) sendiri baru diperkenalkan WHO pada 11 Februari 2020.

Pada 9 Januari 2020, WHO melaporkan bahwa pihak berwenang China telah menetapkan bahwa wabah tersebut disebabkan oleh virus korona baru (*novel coronavirus*). Tanggal 30 Januari 2020, Direktur Jenderal WHO mendeklarasikan peringatan tingkat tinggi kepada seluruh dunia tentang ancaman virus corona ini melalui *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC).

Berdasarkan kronologis peristiwa diatas, sesungguhnya informasi tentang potensi ancaman dari COVID-19 ini sudah menyebar melalui pemberitaan berbagai media baik secara global maupun di Indonesia, sejak Januari 2020. Meski demikian, respons pemerintah terhadap informasi tersebut belum menunjukkan adanya keseriusan. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Terawan Agus Putranto malah tekesan menyepelekan keadaan darurat kesehatan global dengan mengatakan kepada masyarakat, “Jangan panik, jangan resah. Enjoy saja. Makan yang cukup, gaya hidup sehat. Niat Menteri Kesehatan mungkin untuk menenangkan publik – yang tentu dibutuhkan, tapi pesan untuk “enjoy aja” terlihat meremehkan dan menganggap enteng masalah yang sangat serius dan mematikan. Ia juga mengatakan bahwa studi yang dilakukan oleh beberapa peneliti dari Universitas Harvard, yang menyatakan bahwa Indonesia mungkin memiliki kasus yang tidak terdeteksi, sebagai sebuah “penghinaan”. Bahkan pada saat negara-negara lain berusaha

¹ <https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3044050/mystery-illness-hits-chinas-wuhan-city-nearly-30-hospitalised>

² Timeline: WHO’s COVID-19 response diakses melalui <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel->

[coronavirus-2019/interactive-timeline?gclid=CjwKCAiAv4n9BRA9EiwA30WNDxLhmGuai4DgbFH5I-iXBRMU1w5SI87z6-3WgOiVFFUtrDYQ9Cvt8hoCIPAQAyD_BwE#](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/interactive-timeline?gclid=CjwKCAiAv4n9BRA9EiwA30WNDxLhmGuai4DgbFH5I-iXBRMU1w5SI87z6-3WgOiVFFUtrDYQ9Cvt8hoCIPAQAyD_BwE#)

³ <https://internasional.kontan.co.id/news/viral-wabah-pneumonia-misterius-yang-menjangkiti-china-begini-ceritanya>

memperlambat penyebaran COVID-19 dengan memberlakukan pembatasan perjalanan, Indonesia malah mendorong sebanyak mungkin wisatawan agar datang berkunjung.⁴

Ketidaksirosis respons pemerintah, terutama dalam menyampaikan informasi yang jelas dan kredibel, akhirnya berdampak pada ketidakpastian informasi tentang COVID-19 di masyarakat. Masyarakatpun bergerak sendiri secara aktif mencari informasi melalui berbagai media, terutama media sosial dan situs berita online. Hasil kajian Kelompok Kerja Komunikasi Risiko dan Pelibatan Masyarakat (*Risk Communication and Community Engagement/ RCCE*) COVID-19, menunjukkan bahwa selama bulan Februari hingga Mei 2020, sumber informasi utama sebagian besar masyarakat tentang COVID-19 adalah media sosial dan situs berita online.⁵

Hasil riset Limia dan Pratamawaty tentang penggunaan google trend di Indonesia juga menunjukkan bahwa pada Januari 2020, di saat informasi tentang virus misterius di Wuhan China sudah menyebar di berbagai pemberitaan media, masyarakat Indonesia banyak melakukan pencarian informasi di google dengan mengetik kata kunci "virus corona sudah masuk Indonesia". Banyaknya pencarian kata kunci tersebut di google menunjukkan bahwa adanya ketidakpercayaan pada pemerintah yang pada saat itu mengklaim bahwa virus corona tidak akan masuk ke Indonesia.⁶

Padahal WHO dan Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (*Centers for Disease Control and Prevention*) telah mengeluarkan panduan

komunikasi di masa krisis, yang disebut Komunikasi Risiko (*Risk Communication*). Komunikasi risiko mengacu pada pertukaran informasi waktu nyata, nasihat dan pendapat antara para ahli dan orang-orang yang menghadapi ancaman terhadap kesehatan, ekonomi atau kesejahteraan sosial mereka. Tujuan akhir dari komunikasi risiko adalah untuk memungkinkan orang yang berisiko mengambil keputusan yang tepat untuk melindungi diri mereka sendiri dan orang yang mereka cintai.

Komunikasi risiko menggunakan banyak teknik komunikasi mulai dari komunikasi media dan media sosial, komunikasi massa, dan keterlibatan komunitas. Hal ini membutuhkan pemahaman yang baik tentang persepsi, perhatian dan keyakinan orang serta pengetahuan dan praktik mereka. Ini juga membutuhkan identifikasi awal dan pengelolaan rumor, informasi yang salah dan tantangan lainnya.⁷

Pemerintah baru menanggapi situasi COVID-19 ini secara serius pada awal Maret 2020, saat Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya kasus positif COVID-19 pertama di Indonesia. Barulah setelah itu pemerintah membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan menyajikan informasi secara rutin perkembangan COVID-19 di Indonesia. Meski demikian, tidak jarang terjadi bias atau blunder informasi akibat pernyataan juru bicara COVID-19 Achmad Yurianto pada 27 Maret 2020 yang mengatakan "Yang kaya melindungi yang miskin agar bisa hidup dengan wajar dan yang miskin melindungi yang kaya agar tidak menularkan penyakitnya". Sontak kritik dan kecaman masyarakat dilayangkan

⁴ A. Ibrahim Almuttaqi, *Kekacauan Respons terhadap COVID-19 di Indonesia*, THC Insights no.13/23 Maret 2020, diakses melalui <http://habibicenter.or.id/img/publication/66f28c42de71fefe1c6fdee37a5c1a6.pdf>

⁵ Aulia Arriani, dkk, *Persepsi Masyarakat Terhadap COVID-19*, Suara Komunitas Edisi Pertama – Agustus 2020

⁶ Putri Limia dan Benazir Bona Pratamawaty, Google Trends dan Tren Pencarian Informasi COVID-19 di Indonesia, Jurnal ASPIKOM, Vol.5, No.2, July 2020, hlm. 188-205

⁷ <https://www.who.int/risk-communication/background/en/#:~:text=Risk%20communication%20refers%20to%20the,themselves%20and%20their%20loved%20ones.>

kepada Pemerintah yang berujung pada permintaan maaf Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Kemudian untuk meminimalisir distorsi informasi yang beragam, apalagi yang tidak akurat dan palsu (hoax), pemerintah membuat laman www.covid19.go.id. Laman ini menjadi sumber informasi resmi penanggulangan COVID-19 versi pemerintah. Laman www.covid19.go.id dikembangkan oleh Tim Komunikasi Risiko dan Pelibatan Masyarakat untuk Penanggulangan COVID-19. Tim terdiri dari berbagai elemen yaitu pemerintah, Badan PBB (UNICEF, WHO, dll), mitra pembangunan internasional, organisasi masyarakat sipil dan dunia usaha. Seperti yang tertera dalam laman ini, tujuan dibentuknya laman ini adalah untuk memastikan publik mendapatkan akses pada informasi resmi dan akurat mengenai penanggulangan wabah COVID-19 di Indonesia.

Di laman tersebut, banyak ditampilkan perkembangan data COVID-19 di Indonesia setiap harinya. Materi promosi edukasi tentang menjaga kebersihan dan kesehatan melalui kampanye 3M juga ada di laman tersebut. Laman tersebut juga berisi tentang informasi berita, hasil riset, data, peraturan seputar COVID-19. Masyarakat juga diberikan ruang untuk menyampaikan informasi dan pertanyaan melalui fitur Tanya Jawab di laman tersebut.

Salah satu faktor yang berperan penting dalam penanganan COVID-19 ini adalah faktor komunikasi. Jika dikaitkan dengan Komunikasi Resiko (*Risk Communication*), aspek komunikasi memainkan peranan penting dalam menyampaikan informasi, mempengaruhi perilaku masyarakat, dan membantu negara dalam penanganan situasi darurat kesehatan secara efektif. Dalam Littlejohn, Komunikasi Resiko dimasukkan ke dalam kategori Teori Komunikasi Kesehatan

(*Health Communication*).⁸

Menurut Thomas dalam Wilujeng dan Handaka, komunikasi kesehatan meliputi studi dan penggunaan strategi komunikasi untuk menginformasikan dan memengaruhi pengetahuan individu dan masyarakat, sikap dan perilaku untuk pemikiran kesehatan dan perawatan kesehatan. Komunikasi kesehatan dapat berkontribusi untuk seluruh aspek penanggulangan penyakit dan promosi kesehatan.⁹

Komunikasi kesehatan sendiri memiliki 3 konteks, yaitu komunikasi kesehatan antar pribadi seperti antara dokter dengan pasien, lalu komunikasi kesehatan kelompok, dalam hal ini adalah komunikasi antar anggota keluarga dalam mendukung perilaku hidup bersih dan sehat, serta komunikasi kesehatan untuk masyarakat, seperti promosi kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas, Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, dan Kementerian Kesehatan.

Menurut Littlejohn Teori Komunikasi Kesehatan memiliki peran yang sangat kuat (*powerful*) baik yang dilakukan oleh manusia maupun media komunikasi dalam menyampaikan pesan kesehatan dan dalam mempromosikan baik kesehatan individu dan kesehatan publik. Memang ruang lingkup Komunikasi Kesehatan sangat luas, mulai dari komunikasi intra pribadi, komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, kajian media, Public Relations, Komunikasi Antar Budaya, studi retorika, dan teknologi informasi terbaru.

Tulisan ini mencoba untuk memaparkan upaya pemerintah dalam mengkonstruksi realitas melalui informasi yang disampaikan, yang dibandingkan dengan konstruksi realitas yang muncul dari publik terhadap Pandemi COVID-19.

⁸ Stephen W. Littlejohn, Karen A. Foss, editors. *Encyclopedia Of Communication Theory*. Thousand Oaks, Calif. :Sage, 2009 hlm. 464

⁹ Catur Saptaning Wilujeng dan Tatag Handaka, *Komunikasi Kesehatan: Sebuah Pengantar*, Malang: UB Press, 2017, hlm.7-8

Metode Riset

Artikel ini ditulis menggunakan metode riset kualitatif analisis wacana dengan teknik pengumpulan data melalui penelusuran data sekunder atau dokumentasi. Data dikumpulkan melalui lama www.covid19.go.id serta penelusuran data-data lainnya melalui mesin pencari google. Data-data yang didapatkan kemudian dipilah dan dikelompokkan untuk selanjutnya disajikan secara kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Konstruksi Wacana COVID-19 oleh Pemerintah

Dalam memahami konstruksi wacana COVID-19 oleh pemerintah, kita perlu memahami dulu dasar teoritisnya yaitu Teori Konstruksi Sosial atas Realitas (*The Social Construction of Reality Theory*) yang dicetuskan oleh Peter L Berger dan Thomas Luckmann.¹⁰

Dalam teori ini, realitas sosial merupakan sebuah proses yang terbentuk melalui tindakan dan interaksi antar individu dalam kelompok masyarakat sehingga menghasilkan sebuah realitas sosial yang dialami bersama secara subyektif. Dalam memahami realitas sosial, individu merasionalisasi pengalaman yang dimiliki dengan menciptakan berbagai model dunia sosial dan bersama-sama memaknainya melalui bahasa yang diciptakan sebagai symbol dalam berinteraksi. Dasar pemikiran teori ini memang mengambil ide-ide teori fenomenologi dan teori interaksionisme simbolik.

Menurut Berger, bahasa merupakan unsur utama di dalam proses pembentukan sebuah realitas. Saat

seseorang berbicara dengan orang lain menggunakan suatu bahasa tertentu, pada dasarnya kedua orang tersebut saling mempertukarkan pengalaman dan interpretasinya atas realitas yang mereka pernah alami. Inilah yang menurut Berger merupakan proses eksternalisasi. Dari hasil percakapan tersebut, mereka kemudian meyakini bahwa apa yang mereka katakan merupakan sebuah realitas obyektif karena memiliki kesamaan dalam pengalaman masing-masing. Tahap ini disebut obyektivasi. Setelah itu apa yang mereka yakini sebagai realitas sosial dari hasil interaksi tersebut, mereka yakini sebagai sebuah kebenaran. Inilah proses internalisasi. Begitulah proses konstruksi realitas terjadi sehingga apa yang dianggap benar oleh suatu masyarakat akan terus dianggap benar karena merupakan kenyataan yang terjadi secara turun temurun.

Salah satu alat yang turut membentuk realitas sosial di masyarakat adalah media massa. Media massa, baik media konvensional maupun media baru (*new media*) memiliki berbagai cara memengaruhi bahasa dan makna, mengembangkan kata-kata baru, berserta makna asosiatifnya, memperluas makna, dan istilah-istilah yang ada, mengganti makna lama dengan sebuah istilah dan makna baru, serta memantapkan konvensi makna yang telah ada dalam suatu sistem bahasa. Oleh karena persoalan makna tersebut maka penggunaa bahasa berpengaruh terhadap konstruksi realitas lebih-lebih atas hasilnya dalam hal makna dan citra.

Maka, berdasarkan pemikiran teori konstruksi sosial atas realitas diatas, maka

¹⁰ Peter L. Berger and Thomas Luckmann. *The Social Construction Of Reality: A Treatise In The*

Sociology Of Knowledge. Penguin Books, 1967, hlm. 145

penulis menganalisis bahwa dalam upaya penanganan Pandemi COVID-19 di Indonesia, pemerintah turut berupaya untuk mengkonstruksi realitas sesuai dengan kepentingan pemerintah. Jika diamati semua informasi yang tertera dalam laman tersebut, penulis akan menganalisis konstruksi wacana yang coba disampaikan pemerintah ke masyarakat tentang COVID-19.

1. COVID-19 Bukan Penyakit Mematikan Karena Dapat Disembuhkan

Pandemi COVID-19 memang dapat menyerang siapa saja, dari anak-anak hingga dewasa dan lanjut usia. Dari berbagai informasi yang terpampang dalam laman www.covid19.go.id terlihat upaya pemerintah untuk mengkonstruksi wacana public bahwa COVID-19 dapat disembuhkan. Tujuan pemerintah sepertinya agar masyarakat tidak bersikap panik dan takut untuk beraktifitas. Dari berbagai judul pemberitaan yang ditampilkan di laman tersebut, semua informasi berisi tentang jumlah pasien yang sembuh.

Misalnya dalam rubrik Berita Terkini terdapat berita yang berjudul tentang “Jumlah Pasien Sembuh Dari COVID-19 Terus Bertambah Menjadi 337.801 Orang”, yang tayang pada 31 Oktober 2020. Dalam berita tersebut ditampilkan data-data pasien yang sembuh dari COVID-19 di berbagai daerah di Indonesia. Berita seputar kesembuhan seperti ini selalu ditampilkan dalam perkembangan berita setiap harinya.

2. Pemerintah Mampu Menangani Pandemi COVID-19

Wacana kedua yang banyak muncul dalam berbagai informasi yang tertera di laman www.covid19.go.id berupaya untuk mengkonstruksi atau membangun keyakinan di masyarakat akan kemampuan pemerintah menangani pandemi COVID-19. Hal

itu dapat terlihat dari beberapa berita yang ditampilkan, seperti pada berita berjudul “Penanganan COVID-19 Indonesia Lebih Baik Dari Rata-Rata Dunia”, yang tayang pada 30 Oktober 2020. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito yang didasarkan atas angka rata-rata kesembuhan pasien Indonesia yang mencapai 81,6% lebih tinggi dari rata-rata dunia 73,12%.

Tidak saja wacana keberhasilan pemerintah pusat dalam penanganan pandemi COVID-19, konstruksi keberhasilan pemerintah daerah juga banyak dilakukan di laman tersebut. Misalnya saja berita yang diposting pada 22 Oktober 2020 yang berjudul “Penanganan COVID-19 di 10 Provinsi Prioritas Semakin Membaik”. Adapun yang dimaksud penanganan yang membaik dalam berita tersebut bersandar pada data perbandingan jumlah kematian dengan jumlah kasus yang menurun.

3. Masyarakat Harus Jaga Kesehatan dan Tetap Produktif

Wacana lain yang muncul dalam informasi yang tertuang di laman www.covid19.go.id adalah tentang keseimbangan yang harus dilakukan masyarakat dalam menjaga kesehatan namun juga harus tetap produktif. Hal ini misalnya ditemukan dalam judul berita “Aktris Olla Ramlan Tetap Produktif Saat Pandemi”, yang tayang pada tanggal 28 Oktober 2020. Dalam berita tersebut menekankan pada informasi tentang kreatifitas Olla Ramlan dalam merintis usahanya di masa pandemi COVID-19.

Terkait dengan wacana masyarakat untuk tetap produktif di masa pandemi ini sejalan dengan pernyataan Presiden Jokowi pada 7 Mei 2020 yang menyatakan, “sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan COVID-19 untuk beberapa waktu ke depan. Sejak awal pemerintah memilih kebijakan

Pembatasan Sosial Berskala Besar, bukan lockdown. Dengan PSBB, masyarakat masih bisa beraktivitas, tetapi dibatasi".

Wacana Publik Tentang COVID-19

Meski pemerintah maupun media turut mengkonstruksi realitas sosial melalui informasi-informasi yang beredar, namun demikian, banyaknya informasi dari media sosial turut mempengaruhi persepsi atau wacana publik tentang COVID-19. Dari hasil penelusuran di google terkait persepsi publik terhadap COVID-19, penulis menemukan beberapa wacana yang kerap muncul:

1. Pandemi COVID-19 adalah Konspirasi Global

Salah satu wacana yang cukup kuat muncul di masyarakat tentang pandemi COVID-19 adalah bahwa COVID-19 merupakan sebuah konspirasi elit global. Ada yang menuduh pihak China, sebagai tempat asal dari virus ini muncul, yang sengaja menciptakan virus dan menyebarkannya untuk mempengaruhi ekonomi global. Ada pula masyarakat yang menuduh pihak Amerika yang menyebarkan virus karena didasarkan atas informasi yang beredar bahwa Bill Gates sudah memprediksi akan adanya virus ini jauh hari sebelumnya.

Logika konspirasi yang terbangun adalah akibat dari virus ini yang menyebar secara massif ke seluruh Negara di dunia, mereka kemudian akan memberlakukan lockdown yang banyak digaungkan oleh WHO dibantu tekanan media massa. Banyak negara yang melakukan lockdown akhirnya menyebabkan mata uang hancur, pasar global anjlok, perbankan runtuh. Tujuan elite pun sukses membawa dunia menjadi krisis

global.

Setelah itu semua terjadi lalu apa yang ditawarkan?. Tentu Vaksin, dana negara akan tersedot untuk memburu vaksin. Ketika negara sudah diambang bangkrut, apalagi selanjutnya? Tentu saja selanjutnya elite konspirasi ini menawarkan solusi untuk pemulihan ekonomi, dengan utang-utang yang baru. Negara di dunia akan tenggelam dengan utang yang entah sampai kapan harus melunasinya.¹¹

Salah satu kasus yang mencuat seputar konspirasi adalah kasus yang menyeret Jerinx drummer band Superman Is Dead (SID). Jerinx dilaporkan IDI Bali karena materi posting-an IG-nya pada 13 Juni 2020 yang menyebut Ikatan Dokter Indoneisa (IDI) sebagai kacung organisasi kesehatan dunia (WHO). Drummer itu menulis: "Gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan Rumah Sakit dengan seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan tes Covid-19".¹²

Hal ini juga didukung hasil Survei Spektrum Politika terhadap masyarakat Sumatera Barat (Sumbar) yang menunjukkan bahwa 39,9 persen warga menganggap Covid-19 merupakan hasil konspirasi global atau persekongkolan negara-negara besar di dunia. "Banyak warga Sumbar yang meragukan keberadaan penyakit yang disebabkan SARS-CoV-2 itu. Yang lebih parah, banyak orang yang menganggap ini adalah konspirasi sejumlah negara kapitalis yang ujungnya adalah pembuatan dan penjualan vaksin anti-virus," ujar Peneliti Spektrum Politika Andri Rusta, kepada CNNIndonesia.com.¹³

¹¹ Wibisono, *Konspirasi Elite Global Di Balik Covid-19?*,
<https://www.gatra.com/detail/news/477999/internasional/konspirasi-elite-global-di-balik-covid-19-12>
<https://www.kompas.com/hype/read/2020/08/13/0>

[73626666/perjalanan-kasus-jerinx-dari-kacung-who-sampai-dijadikan-tersangka?page=all](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201005090348-20-554336/survei-39-persen-warga-sumbar-sebut-corona-konspirasi-global)
13

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201005090348-20-554336/survei-39-persen-warga-sumbar-sebut-corona-konspirasi-global>

2. COVID-19 bukan penyakit mematikan, sama seperti flu biasa
Wacana kedua yang banyak muncul di media online maupun media sosial adalah bahwa COVID-19 itu bukan penyakit berbahaya, melainkan sama seperti flu biasa. Wacana ini sempat ramai diperbincangkan saat sebuah akun Facebook Ais Umi Mizaz Terapy membagikan sebuah tulisan panjang yang berisi klaim bahwa Covid-19 hanyalah flu biasa yang ringan. Dalam tulisan yang diunggah pada 25 Mei 2020 itu, diklaim pula bahwa Covid-19 merupakan hasil rekayasa untuk mencari keuntungan. Penyembuhan Covid-19 pun diklaim tidak jauh berbeda dengan penyembuhan flu pada umumnya.

Tulisan itu diawali dengan kalimat yang menyebut tenaga medis hanyalah korban penipuan. Pandemi Covid-19 pun dianggap sebagai rekayasa. "Mereka (tenaga medis) cuma korban penipuan, semua ini settingan, bohongan. Virus Covid-19 beneran ada dan seperti flu lainnya, tapi lebih ringan. Namun mudah menular karena sudah ditambahi asam amino 4x lipat."¹⁴

Wacana untuk menyepelekan COVID-19 memang tidak lepas dari wacana sebelumnya yang menuduh bahwa COVID-19 merupakan rekayasa konspirasi global yang berupaya untuk meruntuhkan perekonomian dunia hingga menyebabkan banyak negara mengalami resesi ekonomi.

Simpulan

Dari pemaparan fakta-fakta di atas, kesimpulan yang dapat ditarik dari artikel ini adalah bahwa memang telah terjadi pertarungan wacana antara pemerintah dengan media lainnya yang berupaya untuk saling memengaruhi persepsi publik

seputar pandemi COVID-19. Dari pesan-pesan komunikasi yang disampaikan pemerintah, baik melalui media massa maupun informasi satu pintu di laman www.covid19.go.id, menunjukkan bahwa pemerintah berupaya untuk mencari keseimbangan antara menjaga kesehatan masyarakat dan menjaga perekonomian nasional. Hal itu diwujudkan melalui pesan-pesan positif yang digaungkan pemerintah seperti bahwa jumlah pasien yang sembuh terus meningkat, warga masyarakat agar tetap produktif di masa pandemi, serta percayakan penanganan COVID-19 pada pemerintah.

Pesan-pesan tersebut sengaja dikonstruksikan sebagai sebuah wacana pemerintah, di tengah-tengah wacana disinformasi yang muncul di benak masyarakat bahwa COVID-19 merupakan sebuah konspirasi elit global yang tidak perlu ditakuti karena sama seperti flu biasa.

Bahkan menurut penulis, pemerintah tampaknya juga mempercayai adanya konspirasi global dalam penyebaran pandemi COVID-19. Hal itu terlihat dari kebijakan yang diambil misalnya dengan pemberlakuan PSBB bukan lockdown seperti negara-negara lain yang akhirnya berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Kemudian kebijakan untuk menerapkan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang bertujuan untuk meningkatkan aktifitas perekonomian masyarakat, meskipun tetap dengan protokol kesehatan yang ketat.

Pernyataan Presiden tentang hidup berdamai dengan COVID-19 juga menyiratkan pandangan dan konstruksi wacana yang hendak disampaikan kepada masyarakat agar jangan terlalu takut dengan COVID-19. Dengan demikian, apa yang menjadi wacana pemerintah tentang COVID-19 pada dasarnya sama dengan persepsi masyarakat yang pada akhirnya membenarkan bahwa COVID-19 sama seperti sakit influenza.

¹⁴ <https://cekfakta.tempo.co/fakta/803/fakta-atau-hoaks-benarkah-covid-19-hanya-flu-biasa-dan-hasil-rekayasa-untuk-cari-untung>

Untuk itu perlu kehati-hatian pemerintah dalam mencermati berbagai wacana yang berkembang di masyarakat seputar COVID-19. Sebab apa yang diyakini berdasarkan pengalaman masyarakat didukung oleh pesan-pesan yang muncul di media, semakin meneguhkan keyakinan tersebut menjadi sebuah realitas sosial. Jangan sampai niat untuk memberikan ketenangan pada masyarakat sesuai dengan tujuan Komunikasi Resiko malah membuat masyarakat menyepelekan COVID-19 sehingga tidak lagi mematuhi protokol kesehatan 3M.

Penulis sendiri meyakini bahwa selalu ada jalan tengah atau jalan ketiga yang dapat menciptakan keseimbangan dalam penanganan COVID-19. Faktor kesehatan masyarakat sama pentingnya, dan tidak dapat dikorbankan untuk kepentingan ekonomi nasional. Begitu pula sebaliknya, ancaman ekonomi bukan berarti harus mengorbankan kesehatan masyarakat. Dibutuhkan suatu keterampilan atau seni dalam menjaga keseimbangan diantara dua kepentingan tersebut dalam penanganan COVID-19. Dan itu dapat diwujudkan melalui konstruksi pesan komunikasi yang efektif agar masyarakat dapat menjaga kesehatan namun tetap produktif. Disini penulis sepakat dengan wacana yang digulirkan oleh pemerintah.

Referensi

- Arriani, Aulia, dkk, *Persepsi Masyarakat Terhadap COVID-19*, Suara Komunitas Edisi Pertama – Agustus 2020
- Berger, Peter L. and Thomas Luckmann. 1967. *The Social Construction Of Reality: A Treatise In The Sociology Of Knowledge*. Penguin Books,
- Limia, Putri dan Benazir Bona Pratamawaty, Google Trends dan

Tren Pencarian Informasi COVID-19 di Indonesia, *Jurnal ASPIKOM*, Vol.5, No.2, July 2020, hlm. 188-205

- Littlejohn, Stephen W., Karen A. Foss, editors. 2009. *Encyclopedia Of Communication Theory*. Thousand Oaks, Calif. :Sage,
- Wilujeng, Catur Saptaning dan Tatag Handaka, 2017. *Komunikasi Kesehatan: Sebuah Pengantar*, Malang: UB Press,